

Judul : "Pemerintah Perlu Keraahkan Sumber Daya Lebih Banyak Tolong Rohingya"
Tanggal : Selasa, 12 September 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

"Pemerintah Perlu Keraahkan Sumber Daya Lebih Banyak Tolong Rohingya"

SEJUMLAH anggota Dewan yang tergabung dalam Dewan Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) mendorong Pemerintah mengerahkan lebih banyak sumber daya untuk menghentikan tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Anggota DPR lintas fraksi ini juga mendorong pimpinan Dewan untuk mengeluarkan sikap resmi kelembagaan terkait kasus tersebut.

Anggota Fraksi PDIP DPR Eva Kusuma Sundari menegaskan, tindakan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya sudah jauh melampaui batas. Makanya, upaya Pemerintah untuk menghentikan itu juga perlu lebih keras.

"Pemerintah harus menaikkan tekanan pada militer Myanmar untuk mengakhiri pembantaian, pembakaran, dan pengusiran masal. Pasalnya, tragedi yang dialami etnis Rohingya terindikasi menghapuskan suatu kelompok manusia. Ada problem naturalisasi di sana," tegas Eva dalam konfrensi pers di

Ruang Wartawan, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Selain mendesak Pemerintah, Eva mengaku akan menggerakkan fraksi-fraksi di DPR untuk membuat sikap resmi terkait tragedi tersebut. Menurutnya, sikap resmi DPR dan parlemen ASEAN sangat diperlukan, karena ASEAN telah menjadi kekuatan untuk perdamaian selama beberapa dekade.

"Kalau di Parlemen, harusnya yang menggerakkan pimpinan dan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR. Namun, anggota Dewan dan fraksi-fraksi bisa mendorong pembentukan sikap resmi DPR," ujarnya.

Anggota BKSAP DPR Mahfudz Siddiq mendukung gagasan tersebut. Politisi PKS ini menduga, pembersihan etnis Rohingya oleh militer Myanmar terkait perebutan sumber daya alam (SDA) oleh negara-negara besar. Apalagi, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China, sama sekali tidak bersuara terhadap masalah ini.

"Kami duga ke arah itu.

Asing berebut mengelola sumber daya alam di Rakhine state. Daerah itu diduga kaya akan sumber minyak dan sejumlah sumber daya alam lainnya," kata Mahfudz.

Desakan Pemerintah dan parlemen ASEAN, lanjut dia, sangat dibutuhkan karena posisi pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi kalah berkuasa dibanding militer. Terlebih, di Rakhine State, Partai Arakan yang menjadi oposisi Suu Kyi memiliki kekuatan mayoritas.

"Perlu ada upaya bahu-membahu untuk memberi dukungan pada Suu Kyi. Harus ada dukungan parlemen dan negara-negara ASEAN agar Suu Kyi bisa menjalankan rekomendasi Dewan HAM PBB," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) PBB untuk Rohingya, Marzuki Darusman, menerangkan bahwa kejahatan kemanusiaan di Rakhine State sudah berlangsung selama 15 tahun. Namun, dalam 2 tahun terakhir ini kondisinya bertambah buruk. ■ ONI